



Pemda DIY Kebut PSEL Jadi Solusi Pengganti TPST Piyungan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah mengebut pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang pengganti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Proyek ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penanganan sampah sekaligus penyediaan energi ramah lingkungan dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, menyampaikan Pemda DIY telah memberikan dukungan awal berupa penyediaan lahan dan penataan kawasan. Lokasi pembangunan PSEL disiapkan di Piyungan, Bantul, dengan luas sekitar 5,7 hektare. Saat ini, proses *land clearing* telah dimulai.

Selain lahan, pemerintah daerah juga wajib memenuhi sejumlah kesiapan teknis lain. "Daerah berkontribusi untuk kesiapan lahan, transportasi sampah, kesediaan air, kesediaan listrik, dan jalan," terang Kusno.

Ia menegaskan, dukungan daerah menjadi fondasi awal sebelum pembangunan fisik dimulai oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat, melalui Danantara, akan bertanggung jawab atas operasional fasilitas tersebut. Danantara akan menggandeng perusahaan pemenang lelang nasional yang tengah berjalan.

"Untuk transportasi sampahnya dari

pemerintah kabupaten/kota," tambah Kusno, merujuk pada mekanisme distribusi sampah dari Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.

Besaran alokasi anggaran dari Pemda DIY kini masih dalam pembahasan, Kusno menjelaskan bahwa seluruh komponen pembiayaan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota, dan Danantara. Finalisasi dokumen tersebut menjadi tahapan sebelum kontrak konstruksi diteken.

Di tingkat pusat, pembangunan PSEL sedang memasuki tahap akhir lelang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemenang lelang ditargetkan diumumkan pada Januari 2026.

"Januari pengumuman pemenangnya kalau sesuai jadwal. Di tingkat daerah, kami finalisasi draft kerja sama antar kabupaten/kota dan DIY," ujar Kusno.

Pemerintah menargetkan konstruksi dimulai pada pertengahan 2026 dengan durasi pembangunan sekitar 18 bulan. Dengan demikian, fasilitas PSEL diproyeksikan selesai pada akhir 2027 dan mulai beroperasi penuh pada 2028.

Keberadaan PSEL diharapkan menjadi solusi permanen bagi permasalahan sampah yang selama ini ditumpu pada TPST Piyungan. Kawasan tersebut menampung sampah dari tiga wilayah dan telah berkali-kali mengalami penumpukan hingga harus ditutup sementara pada periode tertentu.

Dengan teknologi *waste-to-energy*, pemerintah berharap penanganan sampah tidak hanya mengurangi volume timbunan, tetapi juga menghasilkan energi listrik yang dapat menunjang kebutuhan regional.

Tawar menawar

Pemkot Yogyakarta dihadapkan pada kewajiban kontribusi anggaran untuk realisasi proyek PSEL. Tak tanggung-tanggung, dana sekitar Rp15 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta diminta untuk membiayai proses *land clearing* atau pembersihan lahan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, proyek strategis nasional yang didanai oleh dana transfer dari pusat itu memang menuntut partisipasi daerah. Meski demikian, pihaknya masih berupaya menawar supaya beban *land clearing* tidak sepenuhnya ditanggung oleh kekuatan fiskal kota.

"Memang APBD diminta untuk kontribusi, terutama *land clearing*. Tapi, saya masih menawar. Kalau bisa, mbok ya *land clearing*-nya dari Dana Transfer juga," ujar Hasto, Selasa (2/12).

Di luar tarik-ulur anggaran pembersihan lahan, progres PSEL menunjukkan titik terang. Hasil rapat terakhir dengan Danantara menargetkan pemenang lelang sudah ditetapkan paling lambat akhir Januari mendatang. **(han/aka)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Walikota | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Lingkungan Hidup | | | |

Yogyakarta, 14 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005